

MARYAENI

## Pendidikan Karakter dan Multikultural: Pilar-pilar Pendidikan dan Kebangsaan di Indonesia

**IKHTISAR:** Pendidikan karakter akan berhasil seiring dengan pendidikan multikultural, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai universal. Pendidikan karakter, melalui proses pendidikan multikultural, akan menghasilkan manusia yang bermutu, berakhlak mulia, dan berkepribadian, yang tidak hanya mengandalkan kecerdasan intelektual tetapi juga kecerdasan sosial, emosi, dan religiusitas. Pendidikan karakter dan multikultural, dengan demikian, merupakan dua hal yang penting bagi bangsa Indonesia. Pendidikan karakter akan bermuara pada kepribadian yang khas, sementara pendidikan multikultural merupakan pendekatan yang progresif dalam rangka transformasi pendidikan untuk merespons kritik dan kebijakan serta praktek pendidikan secara umum. Bisa dikatakan bahwa hasil pendidikan multikultural adalah terbentuknya karakter yang diharapkan oleh empat pilar pendidikan dari UNESCO (United Nations for Educational, Scientific, and Cultural Organization); dan implementasinya di Indonesia dapat diwujudkan untuk mengamalkan Pancasila, mencapai cita-cita dalam UUD (Undang-Undang Dasar) 1945, menjaga keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), dan mempererat kebersamaan dan kekompakan masyarakat Indonesia seperti diinginkan oleh semboyan negara, yaitu *Bhinneka Tunggal Ika* atau berbeda-beda namun tetap satu juga.

**KATA KUNCI:** Pendidikan karakter, pendidikan multikultural, kesatuan dalam keragaman, serta empat pilar pendidikan dan kebangsaan di Indonesia.

**ABSTRACT:** This paper entitled "Character and Multicultural Educations: The pillars of Education and Nationalism in Indonesia". Character education will be managed in line with multicultural education, in which it is containing the universal values. Character education, through the process of multicultural education, will produce quality human, noble, and personality, which is not only accentuated to intellectual but also rely on social intelligence, emotional, and religiosity. Character education and multicultural, however, are two things that are important to the nation of Indonesia. Character education will lead to the distinctive personality, while multicultural education is a progressive approach to the transformation of education in order to respond to criticism and education policies and practices in general. It can be said that the result of multicultural education is the formation of character education as expected by the four pillars of UNESCO (United Nations for Educational, Scientific, and Cultural Organization); and its implementation in Indonesia can be realized for implementing the Pancasila, achieving the ideals based on the Constitution 1945, maintaining the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia, and strengthen the unity and cohesiveness of Indonesian society as desired by the state motto, *Unity in Diversity*, or it is different but still one too.

**KEY WORD:** Character education, multicultural education, unity in diversity, and four pillars of education and nationalism in Indonesia.

### PENDAHULUAN

Jika kita ingin maju dan berkembang janganlah menengok masa lalu. Biarkan yang lalu berlalu begitu saja. Benarkah demikian? Kenangan, peristiwa atau kejadian, dan sejarah ternyata tidak bisa begitu saja dilupakan. Bagaimana suatu bangsa akan menghargai jasa-jasa para pahlawannya, jika bangsa

tesebut tidak mengenal dan memahami sejarahnya? Dari zaman kerajaan yang ada di Nusantara sampai dengan era Reformasi kini, adakah yang tidak dikorbankan? Ternyata telah banyak anggota dari berbagai lapisan masyarakat yang menjadi korban.

Pertama, perbedaan perlakuan antara "darah biru" (golongan elite) dan rakyat

jelata (golongan alit). Kedua, perbedaan penyikapan warga terdidik dan tidak terdidik. Ketiga, pemilahan warga negara laki-laki dan perempuan. Keempat, pemerataan dalam segala bidang yang tidak kunjung usai. Kelima, hukum dan perundangan-undangan yang tidak konsisten. Dan keenam, keberpihakan penguasa terhadap kaum elite atau elite politik.

Semua berangkat dari titik nol, yang awalnya tidak bertujuan pasti karena hanya meneruskan film-film lama yang selalu diputar pada saat-saat yang tepat. Masih ingatkah kita pada salah satu larik sajak Chairil Anwar berikut ini?

*Kami sudah coba apa yang kami bisa.  
Tapi kerja belum selesai,  
belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu nyawa  
(Anwar, 2000).*

Bagaimana bangsa ini memberi makna atas pengorbanan para pahlawan, pejuang, dan pemimpin bangsa, terlepas dari kesalahan dan dosa mereka? Atau kita lupakan saja mereka demi tidak untuk apa-apa? Setiap era dari sebuah kepemimpinan atau pemerintahan tidak ada yang bersih dan tidak ada yang bebas dari pengorbanan. Siapakah yang dikorbankan?

Berbagai peristiwa anarkis telah membekas pada nurani anak bangsa ini. Kekerasan antar kelompok yang merebak beberapa dasawarsa terakhir ini, kecurigaan dan prasangka yang menyebabkan ketidakpercayaan dan perpecahan antar kelompok, dan pandangan diskriminasi dari golongan tertentu yang menyebabkan rendahnya rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Perselisihan dan tawuran antar geng, antar pelajar, dan antar warga yang seringkali membuat orang tua mengeluh dengan keresahan segunung.

Persoalan sosial-politik pula bisa menjadi contoh dan pajangan yang sangat mudah ditiru, bahkan dipraktekkan setiap saat. Simak saja persoalan korupsi, penyalahgunaan kewenangan, pembelokkan fakta, pengingkaran tuduhan, penyangkalan yang *unlogic*, yang terus-menerus ditayangkan oleh media massa cetak dan elektronik.

Banyak para petinggi di negara Indonesia ini yang diseret ke meja hijau karena perilaku dan tindakan mereka yang melanggar norma dan aturan yang berlaku di masyarakat dan di

negara tercinta ini. Statemen terakhir ini tidak termasuk golongan yang disebut oleh Chairil Anwar, seperti berikut ini:

*Atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan,  
kemenangan, dan harapan.  
Atau tidak untuk apa-apa?  
Kami tidak tahu, kami tidak lagi bisa berkata.  
Kaulah sekarang yang berkata (Anwar, 2000).*

Kita, warga negara dan masyarakat Indonesia, memahami pesan yang disampaikan oleh Chairil Anwar tersebut. Namun, secara praktis, tindakan dan perilaku sebagian warga negara Indonesia abai terhadap pesan yang teramat dalam itu. Betapa tidak, “*Kaulah sekarang berkata*” mengandung arti bahwa kita, warga negara Indonesia, yang diminta untuk mengisi kemerdekaan, bukan menciptakan kerusuhan dan mengkorup uang negara demi kepentingan pribadi dan golongan.

Persoalan demi persoalan, fenomena satu ke fenomena yang lain, kiranya perlu dicermati sebagai permasalahan yang menjadi tanggung jawab bersama, sebagai warga negara Indonesia yang baik. Terlebih jika persoalan dan fenomena tersebut sangat erat kaitannya dengan produk pendidikan kita selama ini.

Pendidikan tidak pernah salah dari berbagai aspeknya. Proses pendidikan diharapkan bisa menghasilkan manusia yang sesuai dengan jiwa Pancasila dan semangat UUD (Undang-Undang Dasar) 1945, saling berbagi, menghormati, dan gotong-royong sesuai dengan jiwa NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan *Bhinneka Tunggal Ika* (walaupun berbeda-beda namun satu juga). Tidak salah jika Proklamator dan Presiden Pertama Indonesia, Ir. Soekarno, berpesan dengan mengatakan, “*Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganku akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri*” (dalam Adams, 1966).

Permasalahan yang tidak mudah dipecahkan adalah bagaimana 4 Pilar Kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan *Bhinneka Tunggal Ika* itu bisa diwujudkan? Sementara itu bangsa Indonesia sendiri dihadapkan pada masalah karakter bangsa yang tidak jelas. Benarkah karakter bangsa ini telah tercerabut dari akarnya? Bagaimana seharusnya model pendidikan karakter di negara tercinta ini?

Semua aspek ini sebenarnya sudah mapan di bumi pertiwi, hanya saja akhir-akhir ini agak dipinggirkan, disingkirkan, dan diabaikan oleh bangsa Indonesia sendiri.

### PENDIDIKAN KARAKTER

Peningkatan kualitas pendidikan bagi suatu bangsa, bagaimanapun, mesti diprioritaskan. Bukankah salah satu indikator negara maju adalah sistem pendidikan yang baik? Ini pernah disampaikan oleh Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, bahwa SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkualitaslah yang dapat menyongsong dan bertahan hidup di masa yang akan datang. Selain itu, kualitas SDM yang handal adalah manusia-manusia yang mampu bersaing secara kompetitif, sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. SDM yang demikianlah yang diharapkan dapat berpartisipasi dalam percaturan dunia yang selalu berubah, berkembang, dan penuh teka-teki.

Namun demikian, kehandalan kualitas SDM tidak bisa dipandang dari satu sisi saja. Ibarat mata uang, maka kedua sisi haruslah seimbang. Kualitas SDM selayaknya dilihat juga dari sisi IQ (*Intelligence Quotients* atau kecerdasan intelektual), SQ (*Spiritual Quotients* atau kecerdasan spiritual), dan EQ (*Emotional Quotients* atau kecerdasan emosional), bahkan gabungan dari EQ dan SQ yang dikenal sebagai ESQ (*Emotional and Spiritual Quotient*).

Hal ini setara dengan pendidikan karakter bangsa Indonesia. Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga dan masyarakat maupun bangsa dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia buat (Suyanto, 2000).

Pendidikan karakter adalah pemberian pandangan mengenai berbagai jenis nilai hidup, seperti kejujuran, kecerdasan, kepedulian, tanggung jawab, kebenaran, keindahan, kebaikan, dan keimanan. Dengan demikian, pendidikan berbasis karakter dapat mengintegrasikan informasi yang diperolehnya selama dalam pendidikan untuk dijadikan pandangan hidup yang berguna bagi upaya penanggulangan persoalan hidup

(Putri, 2010). Pendidikan berbasis karakter akan menghasilkan karakter khas ke-Timuran sebagai manusia yang sadar bahwa dirinya sebagai makhluk, manusia, serta warga negara yang berbudaya dan berkarakter.

Terkait dengan pendidikan karakter ini adalah sejalan dengan empat pilar pendidikan yang dicanangkan oleh UNESCO (*United Nations for Educational, Scientific, and Cultural Organization*), yakni: (1) *Learning to know* atau belajar mengetahui, (2) *Learning to do* atau belajar bekerja, (3) *Learning to be* atau belajar menjadi diri sendiri, dan (4) *Learning to live together* atau belajar hidup bersama (dalam Muhammad, 2013). Pilar ketiga nampaknya berimplikasi pada belajar untuk mandiri dan menjadi orang yang bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan bersama. Sedangkan pilar keempat berarti belajar untuk memahami dan menghargai orang lain, termasuk sejarah mereka, etnis mereka, nilai-nilai, dan agama mereka. Pilar keempat ini ditujukan dan perlu diterapkan, terutama bagi negara-negara yang sedang berkembang.

Satu hal yang perlu juga dicermati adalah pilar keempat, yaitu *learning to live together* atau belajar hidup bersama. Dengan pertimbangan tertentu, pilar keempat tersebut bisa diterapkan pada semua jenjang pendidikan, mulai dari SD (Sekolah Dasar) sampai dengan PT (Perguruan Tinggi). Hidup bersama, berdampingan, sama-sama menjadi siswa/mahasiswa, saling membantu, saling menolong, dan bekerja sama adalah nafas yang perlu dipahami secara praktis, bukan melulu teoretis. Pembentukan sikap positif dan saling menghargai sesama, antar individu, antar etnis, dan antar bangsa perlu terus dipupuk dan dikembangkan.

Permasalahan yang muncul, berdasarkan pembentukan sikap dan saling menghargai tersebut, adalah bagaimana kita memahami dan menghargai sesama, terutama dengan semakin tampak jelasnya campur etnis dalam satu praktek pembelajaran? Hal ini terkait dengan pemahaman kita terhadap istilah "multikulturalisme", yang mestinya diterapkan secara nyata di lembaga pendidikan manapun di Indonesia.

Diakui atau tidak, Indonesia (Nusantara) merupakan salah satu negara multikultural

terbesar di dunia. Kondisi sosialnya yang beragam, dibarengi dengan kondisi geografis, kultural, bahasa, dan agama yang beragam pula. Keragaman tersebut dapat dilihat berdasarkan keragaman etnis yang ada di Indonesia. Dalam konteks ini, fenomena ketertinggalan etnis dalam proses pembangunan, yang bermuara pada gejala kemiskinan struktural, telah melahirkan kekerasan dan perlawanan terhadap pemerintah pusat, yang menjadi salah satu ciri juga dari negara yang bersifat multikultural (Ahmad Wani & Suwirta, 2013). Dimana ada kemiskinan di situ ada kekerasan dan semua itu berakar dari rasa ingin memenuhi kebutuhan hidup.

Luasnya geografi di Indonesia juga berakibat pada sulitnya pengawasan, yang mestinya dilakukan di setiap titik. Karena itu, tidak heran jika perusakan lingkungan dan hutan menjadi tidak terkendali, yang akhir-akhir ini sering dibicarakan dengan topik “*illegal logging*”. Selain itu, gerakan separatisme dan menipisnya rasa kemanusiaan untuk menghargai dan menghormati hak-hak orang lain menjadi permasalahan tersendiri di Indonesia. Belum lagi masalah KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) juga merupakan permasalahan yang tidak terpisahkan dari adanya gejala multikulturalisme di Indonesia.

Lalu, apa yang harus kita lakukan dengan mencermati dan menelaah persoalan keragaman tersebut? Nampaknya, diperlukan suatu strategi yang mampu mewartakan semua fenomena dan persoalan yang ada. Strategi dimaksud, salah satunya, adalah dengan pendidikan multikultural.

### **PENDIDIKAN MULTIKULTURAL**

Sebelum masuk pada topik pembicaraan tersebut, ada baiknya kita bicara sedikit tentang *culture*. Banyak cara dan pandangan untuk mendefinisikan tentang *culture*. Esensi *culture* adalah bagaimana kelompok masyarakat menginterpretasikan, menggunakan, dan menyadari elemen kultural yang nyata, misalnya artefak dan alat-alat kebudayaan. Nilai, simbol, interpretasi, dan perspektif itu sangat berbeda antara satu orang dengan orang lainnya dalam masyarakat modern (Banks, 2004).

Masyarakat di dalam budaya, biasanya, menginterpretasikan makna simbol, artefak, dan perilaku dengan cara-cara yang sama, sebab mereka adalah pemilik kebudayaan tersebut. Dalam hal ini, Derman-Spark menawarkan definisi *culture* yang komprehensif, sebagai berikut:

[...] *the values, traditions, social, and political relationships, and worldwide shared by a group of people bound together by a combination of factors that include one or more of the following: a common history, geographic location, language, social class, dan religion* (dalam Maryaeni, 2013).

Kebudayaan hanya memiliki arti “kebudayaan” jika dilihat baik secara makro maupun mikro. Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan tersendiri dalam kaitannya dengan pembangunan kebudayaan ini. Dalam kebijakan PELITA (Pembangunan Lima Tahun) pada masa Orde Baru (1966-1998), misalnya, ditegaskan bahwa pembangunan kebudayaan nasional diarahkan untuk memberikan wawasan budaya dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembangunan kebudayaan nasional ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, jati diri dan kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri, kebanggaan nasional, serta memperkuat jiwa persatuan dan kesatuan bangsa sebagai pencerminan pembangunan yang berbudaya. Dalam pengembangan kebudayaan bangsa perlu ditumbuhkan kemampuan untuk mengembangkan nilai budaya daerah yang luhur dan beradab, serta menyerap nilai budaya asing yang positif untuk memperkaya budaya nasional (MPR RI, 1988).

Lebih lanjut ditegaskan bahwa kebudayaan nasional yang mencerminkan nilai luhur bangsa itu terus dipelihara, dibina, dan dikembangkan dengan memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas kehidupan, memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa, rasa harga diri dan kebanggaan nasional, memperkuat jiwa persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjadi penggerak bagi perwujudan cita-cita bangsa. Oleh karena itu, hasrat masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pembinaan

dan pengembangan kebudayaan nasional terus digairahkan (MPR RI, 1988).

Dari pernyataan di atas jelas bahwa kebudayaan, yang mengandung nilai luhur itu, harus dipelihara dan dipraktekkan dalam kehidupan keseharian. Tidak mengherankan jika pada akhirnya bangsa Indonesia memandang bahwa norma, adat-istiadat, dan perilaku luhur dipandang sebagai sesuatu yang sangat berguna pada era globalisasi ini. Artinya, menipisnya perilaku, sikap, serta solidaritas dan kerja sama di era sekarang ini sangat dirasakan gejalanya dan perlu ditangani segera melalui proses pendidikan. Ini pula yang mendasari pentingnya pendidikan multikultural yang acapkali terpinggirkan, kalau tidak boleh dikatakan dianak-tirikan.

Banyak dan bervariasi definisi tentang “kebudayaan”, maka beragam pula pendapat tentang “pendidikan multikultural”. Satu pendapat tentang pendidikan multikultural sengaja dikutip secara lengkap berikut ini, agar pemahaman kita tentang hal tersebut lebih jelas dan komprehensif.

Multicultural education is a progressive approach for transforming education that holistically critiques and responds to discriminatory policies and practices in education. It is grounded in ideals of social justice, education equity, critical pedagogy, and a dedication to providing educational experiences in which all students reach their full potentials as learners and as socially aware and active beings, locally, nationally, and globally. Multicultural education acknowledges that schools are essential to laying the foundation for the transformation of society and the elimination of injustice (Gorski, 2010).

Pendidikan multikultural merupakan pendekatan yang progresif dalam rangka transformasi pendidikan untuk merespon kritik kebijakan dan praktek pendidikan secara umum. Hal ini berarti bahwa pendidikan umum dianggap tidak mampu mewartakan semua permasalahan pendidikan. Beberapa pandangan juga sependapat bahwa pendekatan multikultural bisa dimanfaatkan untuk mengantarkan siswa dari keragaman menuju keseragaman yang berkualitas sama (Maryaeni, 2013). Tidak ada perbedaan dan tidak harus dibedakan siapa siswa yang mengikuti pelajaran, bagaimana beragamnya

pengetahuan yang dimiliki siswa sesuai dengan latar belakangnya, serta dari mana siswa berasal, apakah dari desa, pinggiran, daerah tertinggal, dari kota kecil, sampai dengan kota metropolitan.

Sebagai sebuah pendekatan, atau strategi dalam bidang pendidikan, pendidikan multikultural memiliki tujuan yang pasti dan terarah, sehingga secara operasional dapat dicapai oleh semua unsur dalam suatu institusi pendidikan.

A major goal of multicultural education is to reform the school and other educational institutions so that students from diverse racial, ethnic, and social-class groups will experience educational quality. Another important goal of multicultural education – revealed in this literature – is to give both male and female students an equal chance to experience educational success and mobility (Sadker & Sadker, 1982).

J.A. Banks (2004) juga menekankan bahwa tujuan pendidikan multikultural itu akan berhasil jika perubahan-perubahan dirancang dan direncanakan secara matang, misalnya perubahan kurikulum, bahan ajar, gaya mengajar dan belajar, sikap, persepsi, perilaku administrasi dan guru, tujuan, norma, dan budaya sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai suatu organisasi tampaknya memerlukan sistem yang jelas arahnya. Jika diniatkan untuk mendirikan lembaga yang berlabel “pendidikan multikultural”, maka seluruh unsur dan komponen di dalam pendidikan haruslah dirancang secara matang.

Sebagai ilustrasi sederhana dan sering dicontohkan adalah: jika kita (guru) mengajar di pedalaman Kalimantan atau Papua, maka guru harusnya berhati-hati pada saat dia menjelaskan alat transportasi. Guru bisa saja menjelaskan berbagai alat transportasi, misalnya pesawat, kapal, mobil, sepeda motor, dan lain-lain. Tetapi ketika kita (guru) akan menyebutkan “kereta api”, maka kita (guru) harus berpikir dulu. Bagaimana menjelaskan tentang “kereta api”, sementara alat transportasi jenis ini tidak ada di dekat siswa. Jika kita (guru) tidak menyadari hal ini, maka informasinya akan lewat begitu saja tanpa ada pemahaman dari siswa. Itulah pentingnya pemahaman budaya yang mesti dimiliki anggota kelas, termasuk pengajarnya.

Selanjutnya, lima dimensi pendidikan multikultural, menurut J.A. Banks (2004), adalah: (1) *Content integration*, (2) *Knowledge construction*, (3) *Prejudice reduction*, (4) *Equity pedagogy*, dan (5) *Empowering school culture and social structure*. Masing-masing penjelasannya adalah sebagai berikut:

Pertama, **Content integration**. Ini berkaitan erat dengan aktivitas guru di kelas ketika akan menyampaikan suatu contoh, data, dan informasi dari keragaman kultur dan kelompok untuk menyamakan konsep, prinsip-prinsip, dan generalisasi terhadap teori dari suatu mata ajar yang ada. Contoh, tentang kereta api di atas merupakan hal sederhana yang patut mendapat perhatian kita (guru). Contoh lain, sulit membayangkan kehidupan nelayan, jika lingkungan kita adalah penambang dan/ atau petani. Terdapat istilah-istilah khusus yang mungkin perlu dijelaskan panjang-lebar, misalnya kata *jala*. Bagi nelayan, kata ini tidak sulit karena kesehariannya selalu berhubungan dengan *jala* (jaring ikan), namun sulit bagi siswa yang kesehariannya berkutat dengan cangkul dan alat-alat pertanian yang lain.

Kedua, **Knowledge construction**. Ketika proses konstruksi pengetahuan diimplementasikan di dalam kelas, guru membantu siswa untuk memahami bagaimana pengetahuan diciptakan dan bagaimana pengetahuan itu dipengaruhi oleh ras, etnik, dan posisi individu di dalam kelas sosial atau kelompok. Tidaklah mudah mengantarkan siswa agar memiliki pengetahuan dan wawasan yang sama, ketika seorang guru harus menjelaskan mata pelajaran tertentu; sementara siswa diharapkan untuk mampu mengkonstruksi pengetahuan yang disampaikan oleh guru tersebut di dalam kelas. Variasi materi dan pendekatan mesti dicobakan agar tercapai tujuan yang diinginkan dan menghindarkan dari hal-hal yang bisa memicu kesalahfahaman.

Dicontohkan satu hasil karya sastra yang *nota bene* selalu menampilkan karakteristik penulisnya, alam sekitar yang digambarkan penulis, tema yang diajukan penulis, dan seterusnya. Bagaimana seluruh siswa di Indonesia memahami puisi Sutardji Calsum Bachri, misalnya, dengan judul *Tragedi Sihka Winka dan Sepisau*. Begitu juga dengan

puisi Chairil Anwar dengan judul *Kerawang Bekasi*. Apa yang dilakukan oleh guru ketika mengajarkan kedua jenis puisi itu? Apa tugas yang akan diberikan kepada siswanya? Jika kita (guru) mengajar di pedalaman Kalimantan atau Papua, lalu meminta siswa mengkonstruksi apa yang sudah dijelaskan guru?

Ketiga, **Prejudice reduction**. Tugas guru dalam hal ini cukup berat, karena guru harus berusaha “menipiskan” atau meniadakan prasangka pada diri masing-masing siswa yang beragam itu. Sikap ras, perilaku yang berasal dari tanah kelahiran, harusnya dilebur menjadi sikap dan perilaku yang lebih demokratis, begitu pula nilai yang dibawa dari etnis asalnya. Semua ini diupayakan untuk membantu mengembangkan diri siswa sendiri dalam rangka mencapai keseimbangan dan keharmonisan dalam kelompok sosial di dalam kelas tersebut. Ini sejalan dengan “*learn to live together*”, seperti yang dicanangkan oleh UNESCO (*United Nations for Educational, Scientific, and Cultural Organization*) pada awal akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 (Muhammad, 2013).

Keempat, **Equity pedagogy**. Rasa keadilan perlu diberikan kepada peserta didik yang berasal dari ras, etnis, dan kelas sosial yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Keadilan ini merupakan pendekatan, strategi, dan metode untuk memfasilitasi pencapaian tujuan pembelajaran. Artinya, bahwa keadilan perlu diberikan kepada peserta didik agar terhindar dari rasa tidak percaya diri, rendah diri, dikucilkan dari pergaulan, tidak diajak bermain, dan sebagainya. Tampaknya, pendidikan di tanah air Indonesia sudah menerapkan pendekatan dan metode ini; dan banyak bukti yang bisa dilihat pada lembaga pendidikan, terutama pendidikan tinggi.

Berbaurnya peserta didik dari berbagai etnis di Indonesia merupakan daya tarik tersendiri dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Dalam perjalanan sejarah, pembedaan atau sikap membedakan antara satu etnis dengan etnis yang lain, kelas sosial dalam masyarakat antara yang satu dengan masyarakat yang lain, agama satu dengan agama yang lain, dan seterusnya akan mampu memicu konflik dan perpecahan. Karena itu, tawuran antar warga bisa disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya

hal-hal kecil yang mampu menyulut tawuran, perbedaan pandangan, batas wilayah, dan lain-lain.

Kelima, **Empowering school culture and social structure**. Konsep pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial ini difungsikan untuk mendeskripsikan proses restrukturisasi budaya dan organisasi lembaga, dalam hal ini sekolah, agar siswa dari berbagai ras, etnik, dan kelas sosial yang berbeda akan mengalami sendiri pendidikan yang penuh damai dan pemberdayaan budaya. Seperti kita sadari bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan yang unik. Betapa tidak, mengelola peserta didik yang berbeda-beda dalam hal sosial-ekonomi, kelas sosial, dan etnik itu memerlukan ketelatenan dan sikap berbesar hati yang luar biasa dari para guru dan pendidiknya. Hal ini bukan berarti masalahnya sangat berat, melainkan karakteristik pendidikan multikultural memang berbeda dengan pendidikan pada umumnya.

Keunikan lain yang dihadapi dalam pendidikan multikultural adalah prinsip dan standar etika yang menunjukkan pernyataan tentang dibangunnya perilaku oleh nilai-nilai. Kode-kode etik didapatkan dari nilai-nilai normatif. Nilai-nilai normatif pula dibangun melalui interaksi keseharian dalam komunitas. Pola-pola interaksi yang mapan disaring dan disimbolkan dalam bahasa, yang merupakan refleksi dari sejarah komunitas, religi, dan budaya. Pandangan multikultural di era globalisasi kini mengacu pada pelayanan profesional, bahwa nilai-nilai tersebut meresap ke seluruh aspek kehidupan praktis dan bahwa dialog merupakan sesuatu yang penting untuk meningkatkan pandangan dan pemikiran terhadap kekuatan moral (Tjeltveit, 2000).

#### **EMPAT PILAR KEBANGSAAN DAN PENTINGNYA PENDIDIKAN**

Empat pilar kebangsaan di Indonesia, yaitu Pancasila, UUD (Undang-Undang Dasar) 1945, NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), dan *Bhinneka Tunggal Ika* tidak bisa begitu saja dikaitkan dengan empat pilar pendidikan yang dicanangkan oleh UNESCO (*United Nations for Educational, Scientific, and Cultural Organization*). Jika ada yang mencoba mengaitkannya, maka itu sama saja artinya dengan tidak memiliki

wawasan tentang sistem pendidikan nasional yang punya karakteristik tersendiri, khususnya milik bangsa Indonesia.

Apakah kelemahan kita, sebagai bangsa Indonesia? Kelemahan kita ialah bahwa kita kurang percaya diri sebagai bangsa, sehingga kita menjadi bangsa penjiplak produk luar negeri; kurang mempercayai satu sama lain, padahal kita ini asalnya adalah masyarakat yang sama-sama gemar bergotong-royong. Tidak ada empat pilar yang kita miliki ini sama persis dengan pilar-pilar kebangsaan di negara lain. Karena itu, empat pilar kebangsaan jelas bersumber dan bermuara pada budaya bangsa Indonesia yang khas, yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Jika boleh dirangkum, maka empat pilar kebangsaan Indonesia tersebut (versi penulis) adalah sebagai berikut:

Meskipun berbeda pada hakikatnya adalah satu jua. Persatuan dan kesatuan telah terwadahi dalam rumah kita, NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Berangkat dari rumah, kita kejar dan gapai cita-cita dengan berpedoman pada falsafah negara Pancasila dan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945. Kita langkahkan kaki, satukan rasa, eratkan tali persaudaraan. Perkuat dan perkokoh harapan. Tataplah dan membaralah semangat kebersamaan dalam dada bangsa Indonesia.

Persoalan yang muncul di permukaan adalah yang seringkali di luar batas norma dan kebiasaan bangsa Indonesia dan merupakan cemin bahwa bangsa ini telah melupakan akar budayanya, khilaf dengan adat-istiadat, menyimpang dari rel kemanusiaan, serta perilaku yang tidak sesuai dengan alam dan budaya Indonesia. Betapa tidak? Perampokan yang melayangkan nyawa, kekerasan di setiap titik daerah, curanmor (pencurian kendaraan bermotor), perkosaan, jual-beli bayi, penyelundupan obat terlarang dan berbagai jenis makanan yang diolah dengan zat-zat berbahaya, serta isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) merupakan fenomena yang jamak dan lumrah di Indonesia. Apakah ini simbol kemajuan bangsa? Apakah ini simbol modernisasi, dengan gaya hidup *jet set*, pola hidup acak-acakan, pandangan hidup yang tidak jelas, dan seterusnya?

Di sinilah pentingnya konsep *learning to live together*, yang mencoba dan belajar

memahami serta menghargai orang lain dengan asal-usul etnis, nilai-nilai, dan agamanya. Terjadinya proses *learning to live together* pada model pendidikan multikultural dan penerapan pilar keempat dari UNESCO – seperti penanaman sikap kebiasaan hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi dan menerima – perlu dikembangkan dan ditingkatkan, bukan hanya di lembaga pendidikan, melainkan juga pada semua lapisan masyarakat. Pengkondisian ke arah yang memungkinkan tumbuhnya sikap saling pengertian antar ras, suku, dan agama mutlak perlu direalisasikan dengan berbagai model dan domain pendidikan yang komprehensif.

Dengan mengaplikasikan empat pilar kebangsaan dalam konteks pendidikan di Indonesia, serta empat pilar pendidikan dari UNESCO, diharapkan agar masyarakat Indonesia dapat mengembangkan dan meningkatkan kualitas kompetensi intelektual dan profesional, serta dimilikinya sikap, kepribadian, dan moral seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Dengan kompetensi yang dimiliki dan sikap manusia Indonesia yang diidamkan, pada gilirannya mata dunia akan tertuju kepada masyarakat Indonesia yang bermartabat dan pandai bersyukur. Bangsa Indonesia memang harus selalu ingat dengan lagu *Syukur*, seperti kutipan syairnya berikut ini: “[...] tanah air pusaka / Indonesia tercinta / Syukur aku sembahkan / kehadiran-Mu, Tuhan” (dalam TPS, 2007).

Bersyukur kita dengan apa yang kita miliki, yaitu tanah air Indonesia. Dengan selalu menyebut nama-Nya (Tuhan), kita akan selalu merasakan betapa nikmatnya menjadi manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila, berhaluan UUD 1945, bersatu dalam keaneragaman, dan berdiam di wilayah NKRI yang damai. Mestinya kita bisa menikmati betapa semangat dari seorang seniman Gombloh (almarhum) telah memberi syair lagu yang sangat berarti, bahkan bermakna kepada rakyat Indonesia. Mari kita simak lagi syair lagu Gombloh tersebut dengan judul *Kebyar Kebyar*, berikut ini:

Indonesia ... Merah Darahku, Putih Tulangku  
Bersatu dalam Semangatmu  
Indonesia ... Debar Jantungku, Getar Nadiku  
Berbaur dalam Angan-anganmu  
Kebyar-kebyar, Pelangi Jingga

Biarpun Bumi Bergoncang  
Kau Tetap Indonesiaku  
Andaikan Matahari Terbit dari Barat  
Kaupun Tetap Indonesiaku  
Tak Sebilah Pedang yang Tajam  
Dapat Palingkan Daku darimu  
Kusingsingkan Lengan  
Rawe-rawe Rantas  
Malang-malang Tuntas  
Denganmu ...

Indonesia ... Merah Darahku, Putih Tulangku  
Bersatu dalam Semangatmu  
Indonesia ... Debar Jantungku, Getar Nadiku  
Berbaur dalam Angan-anganmu  
Kebyar-kebyar, Pelangi Jingga  
Indonesia ... Merah Darahku, Putih Tulangku  
Bersatu dalam Semangatmu  
Indonesia ... Nada Laguku, Symphoni Perteguh  
Selaras dengan Symphonimu  
Kebyar-kebyar, Pelangi Jingga (dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Gombloh>, 15/4/2013).

Sementara itu empat pilar pendidikan dari UNESCO (*United Nations for Educational, Scientific, and Cultural Organization*), anggaplah merupakan cara atau strategi untuk membekali anak bangsa Indonesia agar menjadi manusia yang Pancasila, berkarakter, yang tidak akan lupa dengan cita-cita luhur para pendiri dan pahlawan bangsa. Adalah sarana untuk memahami bahwa anak bangsa adalah penerus cita-cita dan memperjuangkan dan mempertahankan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia); meski anak bangsa tahu bahwa ada perbedaan, namun tetaplah satu rasa dan jiwa dalam proses mencapai kedamaian di muka bumi Nusantara.

Karena itu, tidaklah cukup jika sekedar *learning to know*. IQ (*Intelligence Quotients* atau kecerdasan intelektual) bukan tujuan utama pendidikan anak bangsa, sebab tanpa keterampilan yang memadai, IQ akan “oleng” diterpa ombak badai peradaban. Karena itu, *learning to do* merupakan kecakapan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh anak bangsa Indonesia sebagai bekal hidup dan untuk mencapai *learning to be*, yang bisa berkembang sesuai dengan kepribadian bangsa.

Jika anak bangsa sudah memiliki IQ seperti yang diharapkan, memiliki kecakapan hidup seperti yang diinginkan, dan bisa mengembangkan diri untuk menghadapi peradaban, maka aspek terakhir yang perlu disadari oleh anak bangsa Indonesia adalah



bahwa dia tidak bisa hidup sendiri, tapi harus *learning to live together*. Hidup itu baru dikatakan “hidup”, jika anak bangsa bisa hidup berdampingan dengan yang lain, sebagai teman, saudara, keluarga, masyarakat, dan warga negara, yang bernaung di bawah satu payung (rumah) bernama Tanah Air Indonesia. Berdasarkan itu pula, pendidikan multikultural memegang peranan penting dalam menyukseskan hidup gotong-royong, bahu-membahu, saling membantu, saling percaya, saling menghormati, saling menghargai, dan seterusnya.

### KESIMPULAN

Pendidikan karakter bangsa akan berhasil seiring dengan pendidikan multikultural, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai Pancasila. Pendidikan karakter, melalui proses pendidikan multikultural, akan menghasilkan manusia Indonesia yang bermutu, berakhlak mulia, dan berkepribadian, yang tidak hanya mengandalkan kecerdasan intelektual tetapi juga kecerdasan sosial, emosi, dan religiusitas.

Secara kebetulan, atau dengan tidak disengaja, munculnya empat pilar pendidikan dari UNESCO (*United Nations for Educational, Scientific, and Cultural Organization*) adalah seiring dengan pentingnya empat pilar kebangsaan di Indonesia. Hal itu bukan berarti tidak berhubungan, melainkan bisa dicari benang merahnya. Ketika bangsa Indonesia menerapkan empat pilar pendidikan dari UNESCO, maka empat pilar kebangsaan juga mendesak untuk disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Keberhasilan sosialisasi empat pilar kebangsaan ini akan sangat menopang keberhasilan empat pilar pendidikan dari UNESCO. Demikian pula sebaliknya, keberhasilan empat pilar pendidikan dari UNESCO akan sangat membantu suksesnya empat pilar kebangsaan di Indonesia.

Akhirnya, saya ingin menandatangani sekali lagi, dengan menyanyikan salah satu lagu terkenal di masa perjuangan, “Maju Tak Gentar”, yang salah satu bunyi syairnya adalah: “*Maju tak gentar membela yang benar / Maju serentak tentu kita menang*” (dikutip dalam TPS, 2007:93).

## Bibliografi

- Adams, Cindy. (1966). *Bung Karno, Penjambang Lidah Rakjat Indonesia: Sebuah Otobiografi sebagaimana Ditjeritakan kepada Cindy Adams*. Jakarta: Penerbit Hadji Mas Agung.
- Ahmad Wani, Hilal & Andi Suwirta. (2013). “Ethnic Conflict in Nigeria: A Need for True Federalism” dalam *TAWARIKH: International Journal for Historical Studies*, Vol.5(1) October. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press, ASPENSI, and UVRI Makassar, pp.57-70.
- Anwar, Chairil. (2000). *Kerikil Tajam dan Yang Terampas dan Yang Putus*. Jakarta: Penerbit Dian Rakyat, pertama terbit tahun 1949.
- Banks, J.A. (2004). “Multicultural Education: Historical, Development, Dimensions, and Practice” in J.A. Banks [ed]. *Handbook of Research on Multicultural Education*. San Fransisco: Jossey-Bass.
- Gorski, Paul C. (2010). “The Challenge of Defining Multicultural Education”. Tersedia [online] juga di <http://www.edchange.org/multicultural/initial.html> [diakses di Malang, Jawa Timur: 15 Maret 2012]. <http://id.wikipedia.org/wiki/Gombloh> [diakses di Malang, Jawa Timur: 15 April 2012].
- Maryaeni. (2013). “Pendidikan Multikultural: Keragaman dalam Keseragaman”. Tersedia [online] juga di <http://www.maryaeni.com/pendidikan-multikultural-keragaman-dalam-keseragaman.html> [diakses di Malang, Jawa Timur: 15 April 2013].
- MPR RI [Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia]. (1988). *GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) dan Ketetapan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) Tahun 1988*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Muhammad, Nur. (2013). “Empat Pilar Pendidikan Menurut UNESCO dan Lima Pilar Pendidikan di Indonesia”. Tersedia [online] juga di <http://nurso7.blogspot.com/2012/10/empat-pilar-pendidikan-menurut-unesco.html> [diakses di Malang, Jawa Timur: 15 April 2013].
- Putri, Rizkyana Z. (2010). “Pendidikan Berbasis Pembangunan Karakter”. Tersedia [online] juga di <http://putrizkyana.blogspot.com> [diakses di Malang, Jawa Timur: 15 Maret 2012].
- Sadker & Sadker. (1982). *Sex Equity Handbook for Schools*. New York: Longman.
- Suyanto. (2000). *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III*. Yogyakarta: Penerbit Adicita.
- Tjeltveit, Alan C. (2000). “Natural Moral Sense as Basis for Professional Ethics: An Important Proposal but Unlikely to Produce Excellence” dalam *Journal of Psychology and Theology*. Canada: Rosemead School of Psychology Publisher.
- TPS [Tim Puspa Swara]. (2007). *Kumpulan Lagu Nasional, Persembahan untuk Indonesiaku: Plus Akor dan Riwayat Komponis Indonesia*. Jakarta: Penerbit Puspa Edukasi.



**Pendidikan Karakter, Multikultural, dan *Bhinneka Tunggal Ika* di Indonesia**  
(Sumber: [www.google.com](http://www.google.com), 8/9/2013)

Meskipun berbeda pada hakikatnya adalah satu jua. Persatuan dan kesatuan telah terwadahi dalam rumah kita, NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Berangkat dari rumah, kita kejar dan gapai cita-cita dengan berpedoman pada falsafah negara Pancasila dan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945. Kita langkahkan kaki, satukan rasa, eratkan tali persaudaraan. Perkuat dan perkokoh harapan. Tataplah dan membaralah semangat kebersamaan dalam dada bangsa Indonesia.